KAJIAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DUSRAL, 24151059, Program Studi S1 Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas,
62 halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan perlindungan hukum secara khusus karena anak tidak hanya berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pembinaan dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya penanganan terhadap anak penyalahguna narkotika masih cenderung berorientasi pada pemidanaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika dan formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam perspektif hukum progresif, anak penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat dan negara, sehingga penegakan hukum tidak hanya mewujudkan keadilan substantive dan menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. 2) Formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu kebijakan hukum di Indonesia perlu diarahkan pada paradigma perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak. Anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban sehingga penanganannya harus lebih mengedepankan rehabilitasi, pembinaan dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan yang diwujudkan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP, disertai penguatan norma mengenai perlindungan anak.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahguna Narkotika, Anak.

A PROGRESSIVE LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR MINORS INVOLVED IN NARCOTICS ABUSE

DUSRAL, 24151059, Bachelor of Laws (S1) Study Program,
Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities, Dharma Andalas University,
62 pages, 2026

ABSTRACT

Minors involved in narcotics abuse require special legal protection because they may face the legal system not only as perpetrators but also as victims in need of guidance and rehabilitation. However, in practice, the handling of minors who abuse narcotics still tends to be oriented toward criminal punishment. This study aims to examine the progressive legal perspective regarding legal protection for minors involved in narcotics abuse and to determine the ideal legal policy formulation for their protection. A normative-juridical research method was employed, with data obtained through literature review. The research results indicate that: 1) A progressive legal approach to protecting minors involved in narcotics abuse prioritizes the child's best interests through a humane, just, and rehabilitation-oriented method. From a progressive legal perspective, a minor who abuses narcotics is viewed not merely as a criminal offender but also as a victim entitled to protection, rehabilitation, guidance, and social reintegration. Therefore, legal protection for minors must be implemented through synergy among law enforcement officials, families, the community, and the state, ensuring that law enforcement achieves substantive justice while safeguarding the child's future as the nation's next generation. 2) Regarding the ideal legal policy formulation for protecting minors involved in narcotics abuse, Indonesia's legal policy needs to be directed toward a child protection paradigm that prioritizes the best interests of the child. Children are viewed not merely as perpetrators of criminal offenses but also as victims; consequently, their handling must prioritize rehabilitation, guidance, and social reintegration over punitive measures. This approach is realized through the harmonization of the Narcotics Law, the Juvenile Criminal Justice System Law, the Child Protection Law, the Criminal Code (KUHP), and the Criminal Procedure Code (KUHAP), alongside the strengthening of norms regarding child protection.

Keywords: *Progressive Law, Legal Protection, Criminal Offense, Narcotics Abuser, Child.*